

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, J. (2020). *Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT. SS*. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Universitas Airlangga: Surabaya.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta

Markus, M., & Lalu, H. (2005). *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UMXyZUGYmwC&oi=fnd&pg=PR17&dq=%22m+markus%22+perpajakan+indonesia&ots=Ex_FLX6BpH&sig=IH1yHd5BjAufEzrlqNgQ6OlUFNk

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan / Atau Kenikmatan. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26.

Resmi, S. (2008). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi Empat). Jakarta (4th ed.). Salemba Empat.

Soemarso, S. R. (2007). Perpajakan: pendekatan komprehensif. Jakarta. Salemba empat.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SDhknMsorG4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=perpajakan+pendekatan+komprehensif&ots=B0iUoir95C&sig=UcHmqDPcFoWrqK7OvgUVOjknrQo>

Waluyo, P. I. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta (9th ed.). Salemba Empat.